**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN**

**DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAH DAERAH**

**Hendrianto, Popi Fauziati, Ethika,**

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta**

**E-mail :** [hendriantohendri0208@gmail.com](mailto:hendriantohendri0208@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan, meliputi : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi. Serta Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan Masyarakat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara Nasional yang dipublikasikan Surat Keputusan Mentri dalam negeri, Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan melalui website Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komposisi Anggota DPRD yang dipublikasikan melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan melalui website Badan Pusat Stastistik (BPS).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi, dan Fungsi Pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Pengawasan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci: Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi, Fungsi Pengawasan DPRD, Pengawasan Masyarakat, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**.